

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak reformasi digulirkan pada tahun 1998, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.<sup>1</sup> Indonesia berada dalam proses rumit mewujudkan negara yang demokratis. Proses ini kemudian disebut oleh hampir semua kalangan sebagai era transisi. Namun kapan persisnya era transisi dimulai, sempat menjadi perdebatan, apakah ketika BJ Habibie menggantikan Suharto sebagai Presiden RI ketiga ataukah saat Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden dalam Sidang Umum MPR Oktober 1999.

Istilah reformasi yaitu perubahan radikal untuk perbaikan ( bidang social, politik, atau agama ) dalam suatu masyarakat atau agama<sup>2</sup> dan reformasi itu sendiri menjadi sangat populer dan dimaknai secara berbeda-beda oleh setiap orang. Salah satu artinya diberikan oleh Sri Mulyani Indrawati yakni perubahan secara perlahan-lahan dan bertahap dan melalui proses yang bisa dikendalikan untuk memperbaiki suatu kondisi.<sup>3</sup>

Dibandingkan dengan Negara lain yang juga pernah mengalami transisi ke demokrasi, menurut Denny JA,<sup>4</sup> Indonesia kini sedang berada di

---

<sup>1</sup> Amir, Zainal Abidin. *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*. (Jakarta, Pustaka LP3ES, 2003). Cet. ke- 1, h. 282.

<sup>2</sup> Pemerintahan Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka 1990 Cet. ke-1, 2, 3. h. 735.

<sup>3</sup> Mulyani Indrawati, "Kapitalisme Glogal dan Krisis Kepercayaan terhadap Rezim Soeharto", dalam Hidayat, dkk., "*Pers Dalam Revolusi Mei, Runtuhnya Sebuah Hegemoni*", Jakarta: 2000, Gramedia, h. 15.

<sup>4</sup> Denny JA "Di Simpang Jalan Transisi Demokrasi", dalam Manan, "*Gerakan Rakyat Melawan Elite*", Jakarta: Resist Book, 2005, h. 4-10.

simpang jalan dengan tiga pilihan. Pertama, jalan menuju demokrasi terkonsolidasi dan damai; kedua, jalan berputar arah dan kembali ke sistem lama; dan ketiga jalan tak tentu arah dengan konflik berdarah-darah.

Jalan mana yang hendak dituju, menurut Denny sangat tergantung pada bagaimana menjawab tiga tantangan Negara demokrasi baru. Pertama, paradoks demokrasi yang ditandai dengan kebebasan politik dan konflik; kedua, absennya pemerintah akibat sentimen kuat anti atas kontrol pemerintah; dan ketiga, kurangnya komitmen para pemimpin yang sudah terpilih secara demokratis.

Jika mencermati perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, sejauh ini ketiga tantangan tersebut memang merupakan realitas yang sedang dihadapi. Sebagai sebuah dinamika yang masih berproses, kemampuan bangsa dalam menjawab tantangan ini juga belum tuntas teruji. Meskipun demikian, jalan mana yang akan dituju secara *political do*, sudah pasti, yaitu pilihan menuju demokrasi terkonsolidasi dan damai. Oleh karena itu pilihan kedua dan ketiga tampaknya kecil kemungkinannya bisa terjadi<sup>5</sup>.

Buah utama reformasi yang nyata adalah liberalisasi politik, yang ditandai oleh kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan kebebasan berorganisasi. Euforia (perasaan gembira yang belih lebih)<sup>6</sup> kebebasan ini,

---

<sup>5</sup> Penilaian ini berangkat dari realitas bahwa berbagai perubahan fundamental telah berlangsung dengan *social and political cost* yang sangat tinggi. Hal ini disadari oleh mayoritas elite politik yang saat ini mengendalikan kekuasaan. Mereka juga sangat sensitif terhadap berbagai upaya “kembalinya sistem lama” yang sering dituduhkan dipresentasikan secara sporadis oleh mantan-mantan tokoh Orba yang masih gigih mengincar kekuasaan.

<sup>6</sup> Chulsum, Umi., Novia, Windi. *Kamus Besar Bahasa Indonesian*, Surabaya : Kashiko, 2006. Cet. ke- 1 h.573.

menghantarkan bangsa Indonesia dalam sebuah situasi fenomenal yang tidak terjadi di masa Orba.

Di tingkat infrastruktur, terjadi pembaruan berbagai undang-undang khususnya menyangkut kehidupan politik (sistem multipartai dan pemilu langsung). Di tingkat suprastruktur, lembaga-lembaga negara mengalami pembenahan yang mendasar.

Di panggung politik, para elite politik di berbagai tingkatan diindikasikan kurang memiliki kepedulian terhadap kesulitan rakyat. Sementara sebagian rakyat terjebak kesulitan hidup yang kronis, mereka misalnya malah tanpa malu-malu berusaha menaikkan gaji dan tunjangan yang sudah pasti berasal dari pajak rakyat<sup>7</sup>.

Mempertegas carut marut dunia politik di Indonesia, Masykuri Abdillah ketika diwawancarai Kompas (27 Januari 2007) berpendapat bahwa orientasi elite politik Indonesia saat ini lebih dominan kepada kekuasaan atau *how to get a power*, daripada *how to use the power* untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas etika politik para politisi dan pemegang kekuasaan.

Dengan demikian tampak bahwa ternyata salah satu sumber fundamental munculnya berbagai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah kemerosotan moral politik atau etika politik, khususnya di kalangan elite politik.

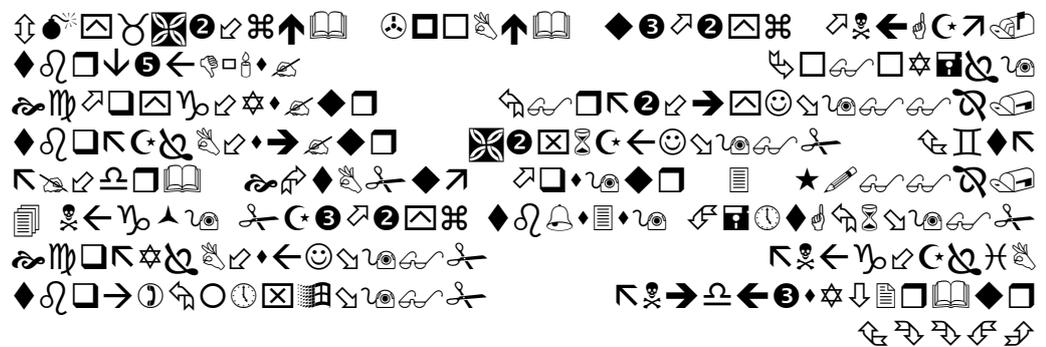
---

<sup>7</sup> Kasus paling mutakhir adalah pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No 37 Th 2006 tentang *Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD*, yang memicu kontroversi luas. Inilah diantaranya yang menguatkan penilaian bahwa elite politik di Indonesia lebih suka mempermainkan aturan (*game of the rule*) daripada menentukan aturan main (*rule of the game*).



Dari ayat diatas kita dapat memahami akan kepentingan politik yang membawa kita kepada kebaikan ( Ma'ruf ) dan menjegah kita dari pada kemungkaran. Namun, dalam pelaksanaan aturan-aturan tersebut haruslah memandang pada etika-etika yang sesuai dengan tuntunan-tuntunan syari'at agama.

Pada ayat yang lain Allah pun telah menjelaskan etika berpolitik tersebut dalam Surah Ali – Imran ayat : 110 :



Artinya : “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”. (QS. Ali-Imran : 110 ).

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis beliau sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتِ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ

“Abu said (abdurrahman) bin samurah r.a. Berkata: Rasulullah saw telah bersabda kepada saya : Ya Abdurrahman bin Samurah, jangan menuntut kedudukan dalam pemerintahan, karena jika kau diserahi jabatan tanpa minta,

*kau akan dibantu oleh allah untuk melaksanakannya, tetapi jika dapat jabatan itu karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau kebijaksanaanmu sendiri. Dan apabila kau telah bersumpah untuk sesuatu kemudian ternyata jika kau lakukan lainnya akan lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan kerjakan apa yang lebih baik itu. (HR. Bukhari & Muslim)<sup>10</sup>*

Hadis di atas sebenarnya mengajarkan tentang etika politik. Seorang politisi tidak serta-merta bebas dari etika, sebagaimana ditunjukkan oleh para politisi kita selama ini. Melainkan seorang politisi dan kehidupan politik itu sendiri harus berdasarkan sebuah kode etik. Bila kehidupan politik tidak berdasarkan etika, maka kesan yang muncul kemudian bahwa politik itu kotor. Padahal, tidak selamanya politik itu kotor, nabi muhammad s.a.w sendiri pernah menjadi seorang politisi, tapi tidak pernah bermain kotor.

Dalam perspektif inilah, Partai Golongan Karya (GOLKAR). mungkin menarik untuk dikaji.

Golongan Karya (Golkar), partai yang menguasai lima kali pemilu (1971 sampai 1992). Zaman Orde Baru, peran Golkar dan pemerintah pusat sangat kuat.

Baru pada tahun 1999, kekuatan Golkar bisa digeser oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai berlambang banteng ini mulai menggoyang Golkar di wilayah hilir , seperti Kabupaten Kotawaringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya.

---

<sup>10</sup> <http://zunlynadia.wordpress.com/2010/12/28/hadis-hadis-tentang-pemimpin-kamis-07,febuari,2013-jam-10:22>

Selain itu, PDI-P juga berhasil merebut wilayah hulu di Kabupaten Barito Utara. Meskipun begitu, kemenangan PDI-P di empat wilayah tersebut bukan kemenangan telak. Golkar masih berusaha membayangnya.

Kemenangan PDI-P tidak bertahan lama. Dalam Pemilu 2004, total perolehan suara Partai Golkar (25,6 persen) di Kalteng mengungguli perolehan suara PDI-P (21,8 persen). PDI-P hanya bisa mempertahankan kemenangan di Kota Palangkaraya.<sup>11</sup>

Pemilihan kepala daerah secara langsung sejak tahun 2005 membawa perubahan besar pada politik Kalteng. Pilkada membuka kemungkinan bagi partai-partai lain untuk berkembang. Dimulai pada Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat, 23 Juni 2005. Kedua wilayah tersebut membawa angin segar bagi partai-partai lain selain Golkar dan PDI-P.

Fenomena itu menjadi menarik karena Partai Golkar atau PDI-P masih unggul di wilayah tertentu, Partai Golkar lebih menguasai wilayah hilir, sebaliknya wilayah hulu menjadi basis suara PDI-P. oleh karena itu politik bagaimana kah yang di terapkan oleh partai Golkar agar mereka mendapati suara yang mereka inginkan dan penerapan etika borpolitik yang seperti apakah agar partai Golkar selalu baik di mata masyarakat ?

Dengan latar belakang pemikiran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam bagaimanakah sesungguhnya **“Etika Berpolitik Dalam Perspektif Dewan Pengurus Daerah Partai Golongan Karya ( GOLKAR ) Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah”**.

---

<sup>11</sup> [http://rizalaminudin.blogspot.com/2009\\_02\\_01\\_archive.html](http://rizalaminudin.blogspot.com/2009_02_01_archive.html) rabu 20-02-2013 jam 09:53

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perspektif DPD GOLKAR Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah tentang etik berpolitik?
2. Bagaimana tinjauan politik Islam tentang etika berpolitik menurut DPD GOLKAR Kotawaringin Timur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan mengkaji pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan etika berpolitik secara umum. Secara khusus pengkajian difokuskan terhadap perspektif etika berpolitik di lingkungan Dewan Pengurus Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perspektif DPD GOLKAR Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah tentang etik berpolitik.
2. Untuk mengetahui tinjauan politik Islam tentang etika berpolitik menurut DPD GOLKAR Kotawaringin Timur.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Dari sejak perencanaan, proses dan penyusunan hasil kegiatan penelitian ini, diharapkan secara relatif memberikan manfaat, yaitu :

1. Kegiatan dan penyusunan hasil penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat bagi penulis dalam perspektif pengembangan diri dan pengembangan kemampuan akademik, disamping hasilnya untuk memenuhi persyaratan tahap akhir proses menyelesaikan studi di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Hasil penelitian ini dapat mendorong pemahaman yang lebih baik bagi semua pihak mengenai hakekat dan betapa strategisnya etika berpolitik Dalam Perspektif DPD partai GOLKAR Kotawaringin Timur Kalimantan tengah.
3. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pengkayaan informasi dan ilmu pengetahuan tentang etika berpolitik dan bias dijadikan sebagai salah satu pijakan dalam menilai perilaku/sikap masyarakat, khususnya kalangan politisi, dalam konteks etika berpolitik.
4. Sumbangan pemikiran dalam rangka menambah Khazanah di Bidang Siyasah Jinayah pada Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Batasan Operasional**

Agar penulisan skripsi ini lebih jelas dan terarah maka penulis perlu mendefinisikan batasan operasional yaitu sebagai berikut:

1. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk.<sup>12</sup> Studi tentang kehendak yang berhubungan dengan keputusan tentang yang benar dan yang salah dalam tindakan perbuatan manusia.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Kanter, E, Y, SH., *Etika Profesi Hukum*. (Jakarta, Storia Grafika, 2001), Cet. ke-1, h. 11.

2. Politik adalah kegiatan dalam suatu system politik atau Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari system tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya.<sup>14</sup>
3. GOLKAR adalah partai Golongan Karya, sebuah partai politik di Indonesia.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan operasional, sistematika penelitian, kajian pustaka.

Bab II. Kerangka teori ini, terdiri dari: pengertian etika, pengertian politik, pemikiran etika berpolitik dalam islam, dan sejarah ke partai GOLKAR.

Bab III Metode Penelitian, Subyek dan Obyek Penelitian, Data dan Sumber Data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian, penyajian data, dan analisis data

Bab V Penutup, berisikan simpulan dan saran-saran.

#### **G. Kajian Pustaka**

Sebelum penulis mengambil masalah ini untuk di teliti penulis pernah membaca skripsi yang berjudul : *“Partai Politik Dalam Pandangan Taqiyuddin*

---

<sup>13</sup> Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta, Kanisius, 1995. Cet. ke- 1 h. 11.

<sup>14</sup> [Http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/1935230-pengertian-politik/](http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/1935230-pengertian-politik/)

*an-Nabhani oleh Raudhatul Jannah ( Nim : 0201135077 )”* judul ini meneliti kasus mengetahui pandangan mengenai partai politik dan dasar yang digunakan serta hal-hal yang melatar belakangi tersebut.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis, sifat, Dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi kasus (*case study*), dengan lokasi di Sampit (Kotim) Kalimantan tengah.

Lokasi penelitian ini bertempat di DPD Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah. Lokasi ini di pilih berdasarkan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat pengurus, kader dan dewan Pengurus daerah partai golongan karia dan belum pernah di lakukan penelitian dengan topik tersebut.

#### **1) Subyek Dan Obyek Penelitian**

Subyek penelitian ini adalah lingkungan internal organisasi dewan pengurus daerah di Kotawaringin timur Kalimantan tengah yang di tetapkan sebagai responden yaitu kader dan Pengurus. Sedangkan obyek penelitian ini adalah tentang Etika Berpolitik Dalam Perspektif Dewan Pengurus Daerah Partai Golongan Karya di Kowaringin Timur Kalimantan Tengah.

#### **2) Data Dan Sumber Data**

##### **a. Data**

Data yang di gali dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Etika berpolitik perspektif DPD GOLKAR Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah.
- 2) Aplikasi Etika Berpolitik DPD GOLKAR Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah.

#### Sumber Data

- 1) Responden, yaitu para pengurus dan kader Partai Golongan Karia Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah tentang Etika Berpolitik.
- 2) Informan, yakni kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat setempat yang dapat memberikan informasi dalam penelitian ini.
- 3) Dokumen, yaitu catatan yang berhubungan dengan obyek yang akan di teliti.

### **3) Tehnik Pengumpulan Data**

Untuk mengali data di lapangan di gunakan beberapa tehnik sebagai berikut:

- a. Wawancara, yakni Tanya jawab langsung dengan responden dan informan.
- b. Dokumentasi, yaitu melakukan cek kearsipan dan surat menyurat yang berhubungan dengan data yang akan di teliti.

### **4) Tehnik Pengolahan Dan Analisis Data**

- a) Tehnik Pengolahan data
  - 1) *Editing*, yaitu meneliti kembali data yang terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya yang perlu di perbaiki dan di sempurnakan.

2) *Kategorisasi*, yaitu mengelompokkan data yang telah di peroleh menurut macamnya ke dalam katagorri tertentu.

3) *Interpretasi*, yaitu menafsirkan data yang di peroleh untuk di jelaskan

#### b) Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu teknik menguraikan, menggambarkan dan menafsirkan data-data yang diperoleh. Disamping itu juga digunakan metode analisis isi atau *content analysis* yaitu proses analisis terhadap makna dan kandungan teks-teks dan pernyataan yang berkaitan dengan GOLKAR. Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah pola pikir reflektif, yaitu berpikir dalam proses mondarmandir secara sangat cepat antara induksi dan deduksi, antara abstraksi dan penyajian. Dengan demikian, dari proses analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran obyektif "*Etika Berpolitik Dalam Perspektif Dewan Pengurs Dairah Partai Golongan Kariya (golkar) Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah*".

#### 5) Prosedur Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang di harapkan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun prosedur penelitian melalui tahapan sebagai berikut:

- a) Tahap pendahuluan, yakni melakukan penjajakan awal ke lokasi penelitian, kemudian berkonsultasi dengan pembimbing, dan mengajukan proposal ke fakultas

- b) Tahapan persiapan, yakni setelah di terima, melaksanakan seminar, membuat surat untuk melakukan penelitian dan mempersiapkan kelengkapan lainnya untuk pengumpulan data.
- c) Tahapan pelaksanaan, yakni menyampaikan surat riset kepada pejabat yang terkait dengan penelitian ini, melaksanakan wawancara dengan informan, mencari catatan atau berkas-berkas yang berhubungan dengan data, mengumpulkan data, mengolah serta menganalisis data.
- d) Tahap penyusunan laporan, yakni melakukan penyusunan laporan hasil penelitian ke dalam bentuk skripsi, melakukan konsultasi dengan pembimbing untuk koreksi dan perbaikan seperlunya dan selanjutnya siap untuk dimunaqasyahkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abu A'la Al-Maududi, *The Islamic law and constitution*, diterjemahkan oleh Drs. Asep Hikmat. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung : Mizan, 1995.
- Amir, Zainal Abidin. *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*. Jakarta, Pustaka LP3ES, 2003.
- Azra, Ayumardi. *Demokrasi Kewarganegaraan Civic Education, Demokrasi Hak Asasi manusia Dalam Masyarakat Madani*. Jakarta, Syarif Hidayatullah, 2000.
- Chulsum, Umi., Novia, Windi. *Kamus Besar Bahasa Indonesian*, Surabaya : Kashiko, 2006.
- Denny JA. *Di Simpang Jalan Transisi Demokrasi*”, dalam Manan, “*Gerakan Rakyat Melawan Elite*”, Jakarta: Resist Book, 2005.
- Effebody, Bahtiar. *Islam Dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta, Paramadina, 1998.
- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/1935230-pengertian-politik/>
- Kanter, E, Y, SH., *Etika Profesi Hukum*. Jakarta, Storia Grafika, 2001.

- Kobrak, Peter. *Cozy Politics . Political Parties Campaign Finance and Compromised Governance*. United States of America : Lynne Rienner Publishers, 2002
- Mohamed S. EI.Wa, On The Political System Of Islamic State.Diterjemahkan oleh Anshari Thajib, Sistem Politik dalam pemerintahan Islam. Surabaya : PT Binan Ilmu, 1987.
- Mulyani Indrawati, *Kapitalisme Glogal dan Krisis Kepercayaan terhadap Rezim Soeharto*”, dalam *Hidayat, dkk., “Pers Dalam Revolusi Mei, Runtuhnya Sebuah Hegemoni”*.Jakarta, Gramedia, 2000.
- Parsons, Wayne. Professor of public police and head of the department of politics. London : Queen Mary Universitas Of London, 2005.
- Pemerintahan Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- Philipus, Ng. dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*. Jakarta : Rajagrafindo, Persada, 2006.
- Shively, W.Phillips, *Power Choice an Introdution to Political Science*. New York : Lyn Uhl, 2003.
- Sumaryono, E. *Etka Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta, Kanisius, 1995.